

## Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendidikan Tentang Potensi Pariwisata Di Kabupaten Sarolangun

Wahyu Rohayati<sup>1</sup>, Navarin Karim<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Article Info	Abstrak
<p><b>Article history:</b> Accepted: 25 Oktober 2022 Publish: 27 October 2022</p> <hr/> <p><b>Keywords:</b> <i>Role of Government;</i> <i>Potency;</i> <i>Tourist attraction;</i> <i>Sarolangun Regency.</i></p>	<p>Penelitian ini akan mengkaji tentang peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pendidikan tentang potensi pariwisata Di Kabupaten Sarolangun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan pendidikan tentang pariwisata bagi masyarakat sarolangun dan bagaimana peran pemerintah dalam mengelola dan meningkatkan potensi kepariwisataan serta faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat tentang perkembangan pariwisata di Kabupaten Sarolangun. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif hasil penelitian ini menjawab bahwa Pengelolaan objek wisata alam di Kabupaten Sarolangun oleh pemerintah (Disparpora) dengan berperan aktif sebagai Fasilitator dengan menyediakan dan membangun sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat, sebagai regulator, masih dijunjung tinggi mengenai aturan larangan secara adat dan budaya. Faktor pendukung dalam pengelolaan objek wisata alam Kabupaten Sarolangun yang paling utama yaitu dukungan masyarakat setempat dan panorama alam yang indah dan masih asli yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata alam Kabupaten Sarolangun. Studi ini menawarkan rekomendasi diperlukan adanya perbaikan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana pariwisata, seperti perbaikan jalan menuju objek wisata, disediakan transportasi yang memadai menuju objek wisata. Perlu penambahan pusat informasi pariwisata demi kemudahan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Sarolangun, Diharapkan pemerintah untuk bekerja sama dengan pihak swasta yang merupakan pihak investor untuk pembangunan dan pengembangan objek wisata daerah sehingga kepariwisataan Kabupaten Sarolangun bisa berhasil dengan maksimal, Diharapkan lingkungan alam disekitar objek wisata alam Kabupaten Sarolangun dapat tetap terjaga agar objek wisata alam ini tetap dapat memberikan kenyamanan bagi para pengunjung.</p>
<p><b>Article Info</b></p> <p><b>Article history:</b> Accepted: 25 Oktober 2022 Publish: 27 October 2022</p>	<p><b>Abstract</b></p> <p><i>This study will examine the role of local governments in improving education about tourism potential in Sarolangun Regency. This study aims to find out how the government's role in improving education about tourism for the Sarolangun community and how the government's role in managing and increasing tourism potential as well as what factors are supporting and inhibiting tourism development in Sarolangun Regency. By using qualitative descriptive research methods, the results of this study answered that the management of natural tourism objects in Sarolangun Regency by the government (Disparpora) by playing an active role as a facilitator by providing and building facilities and infrastructure, community empowerment, as a regulator, is still upheld regarding customary prohibition rules. and culture. Supporting factors in the management of Sarolangun Regency's natural attractions are the support of the local community and beautiful and pristine natural panoramas that can attract tourists to visit Sarolangun Regency's natural attractions. This study offers recommendations for the need for improvement and improvement of the quality of tourism facilities and infrastructure, such as repairing roads to tourist attractions, providing adequate transportation to tourism objects. It is necessary to add a tourism information center for the sake of convenience for tourists visiting Sarolangun Regency, It is hoped that the government will cooperate with the private sector which is the investor for the development and development of regional tourism objects so that tourism in Sarolangun Regency can succeed optimally, It is expected that the natural environment around the tourist attraction The nature of Sarolangun Regency can be maintained so that this natural tourist attraction can still provide comfort for visitors.</i></p> <p><i>This is an open access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</a></i></p>



**Corresponding Author:**

Wahyu Rohayati<sup>1</sup>

<sup>1,2</sup>Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi

[wahyurohayati@unja.ac.id](mailto:wahyurohayati@unja.ac.id)

### 1. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sumber devisa Negara yang mempunyai potensial dan andil besar dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu Negara. Sektor pariwisata di Indonesia hal yang sangat mudah dikembangkan dengan melakukan perbaikan, keamanan dan *management* yang baik agar mampu menciptakan sektor pariwisata yang diminati wisatawan lokal maupun asing dengan rasa kepuasan

2929 | Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendidikan Tentang Potensi Pariwisata Di Kabupaten Sarolangun (Wahyu Rohayati)

yang baik. Dalam hal ini maka akan menciptakan rasa yang ingin berwisata kembali, dengan kata lain akan menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan Negara.

Dikutip dari Disparpora Pesona Pariwisata Sarolangun (2016) Indonesia memiliki potensi alam, keaneka ragaman flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang semuanya itu merupakan sumber daya modal yang besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan. Modal tersebut harus dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan manusia. Pembangunan daerah garis besarnya adalah bagian terpenting bagi pembangunan Nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menselaraskan laju pertumbuhan antara daerah di Indonesia. Salah satu pembangunan daerah dapat dilakukan dengan pengembangan pariwisata. Pengembangan sektor ini Pemerintah berusaha keras membuat rencana dan berbagai strategi yang mendukung kearah kemajuan sektor ini dengan cara mengembangkan potensi objek-objek wisata yang ada sebagai daya tarik utama bagi wisatawan (Retno Puji Rahayu, 2014). Perkembangan Dunia Pariwisata telah mengalami berbagai perubahan baik perubahan pola, bentuk dan sifat kegiatan serta dorongan orang untuk melakukan perjalanan cara berpikir maupun sifat perkembangan itu sendiri. Pariwisata merupakan industri gaya baru yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja.

Peningkatan pada sektor kepariwisataan juga mampu menggalakkan kegiatan ekonomi, antara lain lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah, dan penerimaan devisa negara dapat meningkat melalui upaya pengembangan berbagai potensi kepariwisataan Nasional. Pembangunan di bidang kepariwisataan merupakan salah satu terobosan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan negara. Sektor kepariwisataan akan disejajarkan kedudukannya dengan sektor lain dalam usaha meningkatkan pendapatan negara, maka kepariwisataan dapat disebut sektor Industri pariwisata (Widodo, 2013). Kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata sangat penting perannya dalam menunjang keberhasilan pembangunan pariwisata nasional. Perkembangan dan pertumbuhan pariwisata perlu diantisipasi agar perkembangannya tetap pada jalurnya dan daya dukungnya. Pembangunan dalam wilayah objek wisata akan memberikan sumbangan yang sangat besar apabila dikelola secara baik dan profesional, karena sumbangan bagi daerah yang bersangkutan, pariwisata dapat memacu pertumbuhan perekonomian kawasan sekitar objek wisata tersebut.

Dijelaskan oleh (Dewi Kusuma Sari, 2011) dalam hal melaksanakan sapta pesona merupakan pegangan bagi kemajuan pengembangan obyek wisata. Sapta pesona tersebut hadir dengan adanya pengaruh dari masyarakat dan dan pihak pengelola yang akan menjadi dayatarik bagi pengunjung untuk senantiasa datang ke obyek wisata tersebut. Jika sapta pesona yang ada ditetapkan sepenuhnya maka secara otomatis akan meningkatkan arus kunjungan yang cukup membantu pengembangan bagi suatu obyek wisata. Kepariwisataan yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 4 UU No. 10 Tahun 2009 mengenai Kepariwisataan diketahui bertujuan meningkatkan pertumbuhan perekonomian kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan. Dari Pasal 4 UU No. 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan inilah yang menjadi acuan bagi tujuan pariwisata di Provinsi Jambi (UU No. 10 Tahun 2009 tentang pariwisata).

Objek pariwisata di Kabupaten Sarolangun juga rata-rata tumbuh oleh partisipasi masyarakat desa itu sendiri dalam pengelolaannya (Kecamatan Batang Asai). Tahun 2020 pada masa pandemic covid-19 ini pemerintah kabupaten sarolangun memberlakukan pembatasan akses pembukaan tempat wisata dengan sistem pembatasan, dengan di sosialisasikannya surat dari Disparpora untuk pengelolaan wisata dalam kabupaten sarolangun saat pandemi. Permasalahan yang muncul mengenai kurang berkembangnya pariwisata di Kabupaten Sarolangun serta masih kurangnya pemaksimalan objek wisata di Kabupaten Sarolangun. Dalam hal ini dikhawatirkan hak-hak yang dimiliki oleh wisatawan yang berkunjung tidak sepenuhnya dapat terlaksanakan dan terpenuhi. Hal ini diakibatkan karena lemah dan minimnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap objek pariwisata yang ada. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Potensi Pariwisata Di Kabupaten Sarolangun”.

Studi terdahulu terkait penelitian ini merujuk pada hasil penelitian dengan judul Analisis “Pengembangan Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan PAD” karya Elsa Devi Komalasari (2016),

Bahwa dalam hasil temuan yang tertuang menjelaskan secara umum, pemerintah Kota Bandar Lampung melalui dinas kebudayaan dan pariwisata telah berkontribusi dalam meningkatkan PAD yaitu melalui pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak akomodasi namun hasilnya belum optimal.

Kemudian Penelitian serupa juga diteliti oleh Wirda Febi Sinarti (2015) yang berjudul “Upaya pemerintah kabupaten Sumbawa dalam mengembangkan objek wisata pantai guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. Hasil penelitian ini juga membahas tentang sektor pariwisata dalam menunjang pendapatan asli daerah (PAD), menunjukkan bahwa strategi dan pengembangan pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Sumbawa sudah cukup optimal namun hasilnya belum begitu baik. Kemudian penelitian yang masih serupa tentang sektor pariwisata yang juga menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Bima (2017), dengan judul “Peran Disbudparpora dlm pengembangan potensi pariwisata pantai bandengan dikab. Jepara”. Hasil penelitian ini juga membahas mengenai Hambatan yang ditemui oleh disbudparpora dlm pengembangan daerah wisata pantai bandengan terdiri dari kendala eksternal dan internal ini berupa terbatasnya anggaran dan masih minimnya tenaga ahli dinas terkait, dan kendala eksternal masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat menjadi kendala utama dlm mengembangkan pariwisata di kabupaten Jepara.

Empat *Literatur* di atas masing-masing menjelaskan beberapa penelitian tersebut belum mampu menjelaskan proses peran serta keterlibatan pemerintah daerah dan strategi yang dilakukan pemerintah setempat, dalam meningkatkan potensi unggulan daerah, kendala yang dihadapi bukan hanya dari SDM saja melainkan faktor infrastruktur, keamanan, kenyamanan, Transportasi yang memadai dll. Sementara aspek ini tidak menjadi perhatian utama oleh peneliti sebelumnya, kemudian dalam penelitian ini dapat melihat peran dan faktor-faktor lain yang mendukung terwujudnya wisata yang dapat dikelola/dilakukan pemerintah, terdapat peluang untuk mengkaji peran serta pemerintah dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penelitian ini.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif deskriptif ini mengandalkan kombinasi observasi, wawancara, dokumentasi, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *satu* Observasi adalah metode mengamati dan mencatat dengan sistematis mengenai fenomena yang diteliti. *Kedua* wawancara yaitu mencari informasi penelitian melalui narasumber dengan mengajukan pertanyaan/menggali informasi yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara langsung kepada narasumber. *Ketiga* dokumentasi (Mudjia Raharjo, 2011) ialah berupa arsip/buku yg mendukung sebuah penelitian untuk memperoleh data yg tersedia. Mencari informasi terkait penelitian ini dilakukan wawancara mendalam dan terstruktur dari berbagai informan dari berbagai kalangan, baik dari kepala dinas, kbid, kasi, Disparpora Kabupaten Sarolangun, penggiat pariwisata Kabupaten Sarolangun, Masyarakat yang mengetahui tentang informasi tentang pariwisata dikabupaten sarolangun. Pendekatan ini digunakan oleh peneliti karena dengan metode ini permasalahan dapat digambarkan dengan jelas dan terperinci mengenai peran dinas pariwisata.

Penentuan informan berdasarkan pemahaman terhadap data yang diperlukan yang diambil dari berbagai level lapisan masyarakat, berbagai kalangan serta pemangku kepentingan di level pemerintah terkait, dan masyarakat. Berbagai level tersebut hanya diambil beberapa perwakilan yang dianggap memiliki kemampuan dalam memberikan informasi yang objektif. Penggunaan metode ini dianggap tepat, karena dianggap mampu menjawab fenomena yang ada.

Berbagai data primer dan sekunder digunakan untuk memahami gejala atas fenomena yang terjadi, Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis data model interaktif melalui Tiga aktifitas analisis data diantaranya, *pertama* reduksi data (*data reduction*), yang berarti merangkum, memilih hal yang pokok dan memfokuskan hal yang penting, data yang didapatkan melalui observasi, dokumentasi, wawancara dan etnografi selanjutnya dilakukan pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data. *Kedua* penyajian data yaitu merupakan rangkaian informasi serta kumpulan-kumpulan informasi disajikan dalam bentuk naratif sesuai dengan pertanyaan penelitian. *Ketiga* memberikan kesimpulan Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data, yang telah diperoleh dan disajikan ditarik sebuah kesimpulan yang secara terus menerus diverifikasi hingga data yang diperoleh benar-benar valid dan kokoh (Miles, Huberman, 2014). Diskusi akan dimulai dari penjabaran peran serta pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam fokus meningkatkan potensi pariwisata serta faktor-faktor yang menjadi kelemahan sektor pariwisata tersebut.

Bagian ini sangat penting untuk menentukan lebih lanjut dalam mengkaji tentang peran pemerintah kabupaten sarolangun dalam keterlibatan meingkatkan sektor pariwisata.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Hasil

Kabupaten Sarolangun yang berada di wilayah Provinsi Jambi. Kabupaten Sarolangun mempunyai banyak potensi dan sumber daya yang kemudian dapat dikembangkan untuk menunjang program otonomi daerah di bidang pariwisata, sehingga berpotensi untuk di kembangkan sebagai daerah wisata. Kabupaten Sarolangun memiliki wewenang sendiri untuk mengelola sumberdaya yang terdapat di wilayahnya, termasuk di dalamnya adalah potensi sumberdaya sektor pariwisatanya. Kabupaten Sarolangun memiliki sektor pariwisata yang potensial untuk di kembangkan serta dipasarkan yaitu mulai dari wisata alam, wisata budaya, dan wisata rohani. Berbagai potensi objek wisata yang ada, sudah sepantasnya daerah ini menjadi destinasi wisata yang baru dan unggul di Propinsi Jambi.

**Tabel. 1** Objek daerah wisata Kabupaten Sarolangun

No	Kecamatan	Nama Objek Wisata
1.	Kec.Sarolangun	Perkampungan Tradisional Muaro Sawah, Ancol, Tepian Cik Minah, Rumah Adat Sarolangun, Danau L. Panjang, Danau Biaro, Masjid Kubah Emas
2.	Batang Asai	Jenis wisatanya danau kaco, Air terjun Telun Tujuh, Air terjun Mudek Niban, Air Terjun Rantau Uba, Air Terjun Narso, Air Terjun Telun Seluro, Makam Keramat, Panorama Bukit Rayo, Pendulang Emas Tradisional, Makam Keramat Bukit Lupo, Batu Tinggi, Arung Jeram Ma. Talang, Olah raga Paralayang.
3.	Air Hitam	Taman Nasional Bukit Dua Belas, Komunitas Suku Anak Dalam (SAD), Habitat Kayu Bulian, Habitat Tanaman Obat, Habitat Tanaman Anggrek/Neventes, Air Terjun Talun, Batu Sesudung, Batu Betumang, Air Meruap Jernih.
4.	Limun	Dam Muaro Kutur, Goa Bukit Bulan, Goa Callow Petak, Panorama Alam Bukit Temulun, Panorama Alam Bukit Bulan, Panorama Alam Bukit Barisan, Panorama Hutan Adat, Panorama Sungai Batang Limun, Panorama Sungai Muaro Limun, Panorama Sungai Binjai Lubuk Bedorong.
5.	Kec.Mandiangan	Hutan Kemasyarakatan
6.	Kec.Pauh	Danau Pauh, Batu Betulis
7.	Pelawan	Danau Kampung Pulau, Pulau Godang Semaru

Sumber Data: Dinas pariwisata, pemuda dan olahraga (Disparpora) Kabupaten Sarolangun

Semua lokasi dan objek wisata di atas masih dalam pengelolaan pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, di Kabupaten Sarolangun. Artinya, pengelolaan dan pengembangan obyek wisata masih mengandalkan insentif dari pemerintah daerah, yang dalam perkembangannya dengan perijinan dari pemerintah daerah dapat dikelola oleh pihak swasta serta masyarakat. Beragamnya jenis obyek wisata di Sarolangun dapat menjadi potensi dan investasi ekonomi yang besar di masa yang akan datang, baik itu bagi pemerintah, swasta maupun masyarakat sekitar, namun tentu saja dibutuhkan berbagai kebijakan proteksi yang tepat agar selalu tercipta kesinambungan diantara *stakeholder* terkait.

Pariwisata yang ada biasanya dikatakan masih tidak dikelola dengan optimal dan baik oleh orang/penduduk disekeliling objek pariwisata, pengelola serta pemerintah setempat. Sarana dan prsarana yang dapat mendukung lokasi wisata di Sarolangun masih minim seperti: Transportasi/kendaraan/infrastruktur mulai dari tempat kota ke lokasi wisata, home stay/wisma dan Telekomunikasi di kawasan wisata. Dikatakan sangat kurang fasilitas yang ada di lokasi pariwisata Sarolangun, dengan tersedianya fasilitas umum yang mendukung dapat membantu pengembangan dalam meningkatkan pendapatan operasional pada objek wisata di Sarolangun. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat dan menunjukkan jumlah kedatangan wisatawan yg mengunjungi objek pariwisata yang ada di Kabupaten Sarolangun.

**Tabel. 2** Jumlah kedatangan Wisatawan di Kab. Sarolangun  
Dari Tahun 2016-2019

Tahun	Kunjungan Wisatawan		Total
	Nusantara	Mancanegara	
2016	31.788	80	31.868
2017	25.672	75	25.747
2018	6.254	70	6324
2019	11.085	45	11.130

Sumber Data: Dinas pariwisata, pemuda dan olahraga (Disparpora) Kabupaten Sarolangun

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami penurunan kunjungan wisatawan nusantara yang jumlahnya cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya. Turunnya kunjungan wisatawan di Kabupaten Sarolangun disebabkan oleh berbagai hal diantaranya karena rendahnya minat para wisatawan untuk berwisata ke Kabupaten Sarolangun, kurangnya informasi pariwisata yang ada, missal saja susah akses transportasi, telekomunikasi, Penginapan, dan juga infrastruktur jalan yang masih banyak rusak menuju objek wisata di kabupaten sarolangun juga menjadi permasalahan yang sangat kompleks.

Objek pariwisata di Kabupaten Sarolangun juga rata-rata tumbuh oleh partisipasi masyarakat desa itu sendiri dalam pengelolaannya (Kecamatan Batang Asai). Tahun 2020 pada masa pandemic covid-19 ini pemerintah kabupaten sarolangun memberlakukan pembatasan akses pembukaan tempat wisata dengan sistem pembatasan, dengan di sosialisikannya surat dari Disparpora untuk pengelolaan wisata dalam kabupaten sarolangun saat pandemi (*Suryadi sebagai penggiat wisata dari Disparpora Kabupaten Sarolangun, 2021*). Permasalahan yang muncul mengenai kurang berkembangnya pariwisata di Kabupaten Sarolangun serta masih kurangnya pemaksimalan objek wisata di Kabupaten Sarolangun. Dalam hal ini dikhawatirkan hak-hak yang dimiliki oleh wisatawan yang berkunjung tidak sepenuhnya dapat terlaksanakan dan terpenuhi. Hal ini diakibatkan karena lemah dan minimnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap objek pariwisata yang ada.

### 3.2. Pembahasan

Adapun Peranan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dalam Mengelola/Meningkatkan Potensi Pariwisata Di Kabupaten Sarolangun sangat penting. Dengan pengelolaan yang baik, pariwisata berperan untuk memberdayakan sumber daya yang ada serta menjadikan industri pariwisata dapat di perpanjang siklus hidupnya dan berkelanjutan. Dalam pengembangan strategi pariwisata dan kebijakan, otoritas yang bertanggung jawab, harus mempertimbangkan pandangan dari sejumlah pemangku kepentingan termasuk industri, penduduk, kelompok khusus yang mewakili kepentingan lingkungan dan masyarakat, serta wisatawan sendiri.

Potensi pariwisata berada pada tahapan identifikasi dan menunjukkan destinasi memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daya Tarik atau destinasi wisata karena didukung oleh keindahan alam yang masih alami, daya Tarik wisata alamiah masih sangat asli, pada sisi lainnya telah ada kunjungan wisatawan dalam jumlah kecil dan mereka masih leluasa dapat bertemu dan berkomunikasi serta berinteraksi dengan penduduk lokal. Karakteristik ini cukup untuk dijadikan alasan pengembangan sebuah kawasan menjadi sebuah destinasi atau daya Tarik wisata.

#### Peran pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal. a. Membangun sarana dan prasarana, Dari hasil observasi, pelayanan pemerintah dalam pengelolaan objek wisata di Kabupaten Sarolangun terhadap masyarakat (pengunjung), pengelola wisata memiliki inisiatif tersendiri untuk menyediakan sarana dan prasarana.

Pelayanan pemerintah dalam pengelolaan objek wisata Kabupaten Sarolangun yaitu seperti menyediakan sarana dan prasarana penunjang bagi wisatawan. Dengan demikian maka kondisi tersebut dapat mendorong terjadinya motivasi orang tertentu untuk datang berkunjung. Adanya pengunjung ini akan menciptakan suatu kondisi yang mengakibatkan terjadinya pertukaran barang atau informasi yang memberikan keuntungan serta ekonomi bagi masyarakat setempat.

Pemerintah mempunyai peran penting dalam pembangunan objek wisata Kabupaten Sarolangun. Dalam hal ini pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat dalam hal pembangunan infrastruktur seperti menyediakan sarana prasarana seperti home stay, toilet dan kamar tidur, perbaikan sarana dan prasarana khususnya di objek wisata alam yang jauh dari kota Sarolangun. Namun sistem promosi yang dijalankan pada kepariwisataan Kabupaten Sarolangun masih dalam sistem promosi dengan melalui media telekomunikasi dan media cetak sehingga masih banyak masyarakat yang jauh dari teknologi mengetahui tentang informasi objek pariwisata yang ada. Kabupaten Sarolangun memiliki potensi objek wisata alam, budaya dan kuliner, yang tidak kalah dengan daerah lain. Posisi sektor pariwisata Kabupaten Sarolangun sangat penting sebagai salah satu bisnis inti, oleh karena itu perhatian pemerintah terhadap pengembangan pariwisata akan bertambah besar dan pembangunan pariwisata menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.

Pemberdayaan Masyarakat, Kabupaten Sarolangun sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki beragam objek wisata yang berpotensi bagi pengembangan pariwisata, namun dengan berbagai keterbatasan maka dari itu pengembangan pariwisata belum baik. Selain memiliki objek wisata alam, ada terdapat objek-objek wisata lainnya dan untuk saat ini Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sarolangun secara bertahap berusaha mengembangkan objek wisata dengan memberikan berbagai sarana-sarana penunjang agar dapat menarik jumlah kunjungan wisata baik dari dalam maupun dari luar. dalam pengelolaan objek wisata Kabupaten Sarolangun masih memiliki banyak kekurangan dalam hal pengelolannya. Namun masyarakat tetap berusaha untuk selalu menjaga keindahan dan kebersihan wisata Kabupaten Sarolangun. Pengelolaan objek wisata Kabupaten Sarolangun tidak terlepas dari campur tangan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga berharap agar masyarakat yang ada di sekitar objek wisata tetap menjaga keindahan dan kebersihan. Oleh karena itu harus ada kerja sama pemerintah dengan masyarakat karena masyarakatlah yang akan menjaga dan membersihkan objek wisata tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pengelolaan objek wisata, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak masyarakat di sekitar lokasi adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan lebih jauh potensi-potensi objek wisata yang dimiliki dalam menunjang kepariwisataan di daerah Kabupaten Sarolangun.
2. Mempromosikan objek-objek wisata tersebut melalui media elektronik, media cetak ataupun dari individu ke individu lain.
3. Membangun segala fasilitas yang dibutuhkan oleh para wisatawan dalam kegiatan liburan, agar wisatawan merasa aman, nyaman dan akhirnya berkeinginan untuk berkunjung kembali.
4. Meningkatkan kemampuan serta keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal memberikan pelayanan kepada wisatawan.

#### **Peran pemerintah sebagai regulator**

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan antara lain:

- a. Aturan retribusi karcis/ tiket pengunjung
- b. Aturan retribusi parkir
- c. Aturan larangan secara adat dan budaya

#### **Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Pengelolaan Objek Wisata Kabupaten Sarolangun.**

Dalam pengelolaan objek wisata Kabupaten Sarolangun, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor-faktor ini harus dihadapi oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga selaku pihak yang berperan dalam pengembangan kepariwisataan Kabupaten Sarolangun.

#### **Faktor Pendukung**

##### *a. Dukungan Masyarakat*

Masyarakat sangat mendukung pengelolaan objek wisata Kabupaten Sarolangun sehingga mereka turut serta mengambil bagian seperti menjaga kebersihan, memelihara dan mengambil keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi di objek wisata sekitar tempat tinggal mereka.

Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sarolangun sangat mengapresiasi antusias masyarakat yang ada disekitar objek wisata karena tanpa ada perintah langsung dari pemerintah masyarakat tetap menjaga kebersihan objek wisata.

Partisipasi aktif dari masyarakat memang seharusnya dilakukan mengingat objek wisata yang ada di Kabupaten Sarolangun banyak dan semua belum tentu bisa di kelola hanya satu pihak seperti Disparpora sebagai pihak yang memang bertanggung jawab dalam pengelolaan pariwisata. Hal yang paling kecil yang bisa membantu pemerintah adalah dengan menjaga kebersihan dan meningkatkan pembangunan sarana agar dapat meningkatkan daya Tarik wisatawan.

#### b. Panorama Alam

Potensi yang dimiliki kawasan wisata Kabupaten Sarolangun sangat mendukung dengan keberadaan objek wisata alam Sarolangun yang menjadi daya Tarik wisatawan untuk berkunjung. Keindahan alam tercermin dari pepohonan yang rindang dan udara yang sejuk di sekitar objek wisata merupakan daya Tarik tersendiri bagi wisatawan. Wisata alam Kabupaten Sarolangun kita disugahi dengan pemandangan alam yang indah. Alam yang masih asli dan indah memberikan udara yang sejuk dan bersih membuat nyaman bagi pengunjung yang datang untuk berwisata.

## 4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan dari hasil penelitian ini, yakni, Pengelolaan objek wisata alam di Kabupaten Sarolangun oleh pemerintah (Disparpora) seperti menyediakan sarana dan prasarana penunjang bagi wisatawan. Pemerintah juga bekerja sama dengan masyarakat menyediakan home stay, kios kuliner dan kios oleh-oleh. Namun sistem promosi yang dijalankan pada kepariwisataan Kabupaten Sarolangun hanya sekedar sistem promosi dengan melalui media telekomunikasi dan media cetak.

Faktor pendukung dalam pengelolaan objek wisata alam Kabupaten Sarolangun yang paling utama yaitu dukungan masyarakat seperti turut serta mengambil bagian seperti menjaga kebersihan di objek wisata sekitar tempat tinggal mereka dan panorama alam yang indah dan masih asli yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata alam Kabupaten Sarolangun yang disugahi dengan pemandangan alam air terjun, goa yang didalamnya terdapat keindahan alam yang indah dan asli. Didukung suasana alam memberikan udara yang sejuk dan bersih membuat nyaman bagi pengunjung yang datang berwisata.

Faktor penghambat dalam pengelolaan objek wisata alam Kabupaten Sarolangun secara umum terbatasnya anggaran sehingga menghambat pembangunan jalan menuju lokasi objek wisata alam Kabupaten Sarolangun. Begitu pula dengan promosi yang dilakukan masih kurang sehingga masih banyak masyarakat yang belum tahu mengenai objek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Sarolangun.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

Bungin, Burhan. (2007). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana.

Disbudparpora. 2016. "Pesona Pariwisata Sarolangun".

<https://books.google.co.id/books?id=rBVNDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v-onepage&q&f=false>.

Diakses 10 Februari 2021. Pukul 22.20 WIB.

<https://pelayananpublik.id/2020/06/15/pengertian-pemerintah-dan-pemerintahan-tugas-fungsi-hingga-jenisnya/dr>.

Diakses 10 Februari 2021. Pukul 20.20 WIB.

<https://rumusrumus.com/data-primer-dan-data-sekunder/>. Diakses 10 Februari 2021. Pukul 22.20. WIB.

[https://www.kompasiana.com/meykurniawan/analisis-data-kualitatif-miles-dan-huberman\\_556c450057937332048b456c](https://www.kompasiana.com/meykurniawan/analisis-data-kualitatif-miles-dan-huberman_556c450057937332048b456c).

Diakses 12 Februari 2021. Pukul 20.20 WIB.

<https://www.uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif-html>. Diakses 12 Februari 2021. Pukul 20.20 WIB.

I Made Wirartha. 2006. Metode Penelitian Sosial Ekonomi. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

I.Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta. 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata. Yogyakarta: Penerbit Andi.

James. J. Spillane. 1982. dalam <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2005/12/20-pengertian-pariwisatamenurut-para-ahli-terlengkap.html>

Mathieson dan Wall (1982) dalam <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-pariwisata-menurut-para-ahli/>

Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldana, J. (2014). Drawing and verifying conclusions. Qualitative data analysis: A methods sourcebook, 275-322.

Pendit. 2002 dalam <https://cvinspireconsulting.com/konsep-pengembangan-pariwisata/#:~:text=definisi%20pariwisata>.

Retno Puji Rahayu. (2011). Strategi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan pariwisata. Vol 3 No.1. Sum Dewi Kusuma Sari, Pengembangan Pariwisata Obyek Wisata Pantai Sigandu Kabupaten Batang, Tahun 2011. Diakses 12 Februari 2021. Pukul 20.20 WIB.

Ryaas.dkk. 2010. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta.

Suwantoro. (2007). Pariwisata. Edisi Pertama Kepustakaan Populer. Jakarta: Gramedia.

Syafie, Inu Kencana, J.S.T. Simorangkir. Diakses dari website ini: <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-pemerintahan-menurut-para-ahli/#:~:text=menurut%20R.%20Mac%20Iver%2C%20pengertian,dapat%20diperintah%20atau%20pun%20dikendalikan>. Diakses 10 Februari 2021. Pukul 20.20 WIB.

T. Hani Handoko. (1997). Berita ini diakses dari website ini: [https://www.academia.edu/12213778/TEORI\\_PENGELOLAAN](https://www.academia.edu/12213778/TEORI_PENGELOLAAN) Diakses 12 Februari 2021. Pukul 20.20 WIB.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Warpani P. (2007). Pariwisata Dalam Tata Ruang Wilayah. ITB Bandung.

Widodo. (2013). (Dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Social Politik, 2016.) <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>